

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta berkomitmen dengan :

Visi“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya.

Misi“Mewujudkan Produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan pesyaratan mutu produk hasil perikanan

“Mewujudkan pengolahan SumberdayaKelautan&Perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama penyakitikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang&dibatasi .

“Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

sejahtera, maju, mandiri, melalui pola Konsumsi Ikan Yang Bermutu serta budidaya ikan yang jelas bebas dari Hama & Penyakit ikan .

Mengacu pada tugas, fungsi pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta **Yakni :**

Tugas Pokok

Melaksanakan pencegahan masuk & tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK) Ke/Di/Keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ,serta penerapan system manajemen mutu baik dipintu masuk/ keluar wilayah administrative Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan darisuat area ke area lain di dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Indonesia
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nyadari HPI dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan tujuan.
3. Pelaksanaan tindakan Karantina terhadap media pembawa media pembawa HPIK .
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Pelaksanaan Inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka Sertifikat penerapan program Manajemen Mutu
7. Pelaksanaan Survailen HPIK ,Mutu dan keamanan hasil perikanan
8. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan ,Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

9. Pelaksanaan pengujian HPIK , Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
10. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pada Laboratorium pelayanan operasional.
11. Pembantu Koreksi Media Pembawa dan/atau HPIK
12. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Perkarantina Ikan Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kebijakan Mutu Dan Aturan Kantor Untuk Pengguna Jasa Dan Pihak Ketiga :

Menjamin Kesehatan ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adalah suatu kebijakan Otoritas kompeten Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dengan Keteladanan, Kebersamaan ,Dedikasi, Kerja Keras dan Disiplin, Berdasarkan Kaidah Profesionalisme.

1. Memastikan Pemenuhan Persyaratan untuk kepuasan pelanggan.
2. Menjamin Pengendalian Sistem Manajemen Kerja
3. Meningkatkan Dan Mengedepankan Kinerja disemua Lini secara berkelanjutan .

Kerjasama maupun Mou kepada pihak ketiga baik mitra/Bank Persepsi/ stake holders antara lain :

- Kerjasama dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk
- Kerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.
- Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta memiliki SDM yang berjumlah 54 Orang yang terdiri dari :

- PNS : 17 Orang - Office Boy : 2 Orang
- PPNP : 5 Orang

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing .

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPIM Yogyakarta adalah sebagai berikut

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang

dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara Pengeluaran , pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan .

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Perperalatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik) Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	82,672,000	26,088,000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	82,672,000	26,088,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,671,286,000	1,484,723,000
Belanja Barang	1,004,358,000	844,388,000
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	3,675,644,000	2,329,111,000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan
Rp.74.015.000,

-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.74.015.000,- atau mencapai 156 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.47.460.000,- Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Jasa.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	47,460,000	74,015,000	155.95
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	47,460,000	74,015,000	155.95

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2024 sebesar Rp.74.015000,- dari Estimasi Pendapatan Sebesar Rp. 47.460.000.-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	74,015,000	99,720,000	0.74
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah	74,015,000	99,720,000	0.74

Realisasi

Belanja Negara

Rp.4.765.144.207

,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 4.765.144.207,- atau 98.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.867.405.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Tahun sebelumnya hal ini disebabkan antara lain

1. Adanya beberapa Mutasi pegawai , Kenaikan gaji berkala adanya beberapa pegawai kenaikan pembayaran Tunjangan kinerja

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,744,064,000	2,730,636,571	99.51
Belanja Barang	2,123,341,000	2,034,507,636	95.82
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4,867,405,000	4,765,144,207	97.90
Pengembalian	-	-	-

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,730,636,571	5,151,155,031	99.41
Belanja Barang	2,034,507,636	3,449,727,156	94.07
Belanja Modal	-	30,891,500	99.84
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,765,144,207	7,346,892,135	97.54

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.2.730.636.571

,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.730.636.571,- dan Rp 5.151.155.031,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,467,927,503	2,527,470,494	(41.92)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,244,016,068	1,982,793,204	(37.26)
Belanja Lembur	18,693,000	132,312,300	(85.87)
Jumlah Belanja Kotor	2,730,636,571	4,642,575,998	(41.18)
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	2,730,636,571	4,642,575,998	(41.18)

*Belanja
Barang Rp,-
2.034.507.636,
-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.034.507.636,- dan Rp. 3.449.727.156,- Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan (91) dari Realisasi Belanja Barang TA 2023

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	590,506,000	734,187,250	(19.57)
Belanja Barang Non Operasional	1,402,900	223,090,461	(99.37)
Belanja Jasa	8,306,000	308,389,655	(97.31)
Belanja Pemeliharaan	752,607,189	611,632,849	23.05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	401,747,943	246,895,311	62.72
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	279,937,604	1,325,531,630	(78.88)
Jumlah Belanja Kotor	2,034,507,636	3,449,727,156	(41.02)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2,034,507,636	3,449,727,156	(41.02)

*Belanja
Modal Rp.0,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,-, dan Rp.00,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023 Hal ini disebabkan

karena adanya pemotongan anggaran pada kegiatan pengembangan gedung Laboratorium SKIPM Yogyakarta

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528,964,000	311,349,210	69.89
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor	528,964,000	311,349,210	69.89
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	528,964,000	311,349,210	69.89

*Belanja
Modal Tanah*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada penambahan aset tanah dikarenakan tidak ada pembelian tanah pada tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Modal Peralatan & Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.6.459.325.022,- mengalami kenaikan 91 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.6.415.313.522,-
Rp.6.459.325.022,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	6,459,325,022	6,415,313,522	0.69
Jumlah Belanja Kotor	6,459,325,022		0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6,459,325,022	6,415,313,522	0.69

Belanja B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Modal Gedung & Bangunan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.624.428.000,- dan Rp.2.624.428.000,-
Rp.2.624.428.000,-
0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Jumlah Belanja Kotor	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)

Belanja

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Modal

**jalan, irigasi
dan jaringan**

Rp.

9.980.000,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9.980.000,- dan Rp.9.980.000,-. Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 tidak mengalami perubahan / nihil.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Jaringan	9,980,000	9,980,000	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	9,980,000	9,980,000	0.00

Belanja

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Modal

Lainnya Rp.

0,00,-

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.0,00

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan

Sosial

Rp.0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya lebih kearah

pengawasan dan pencegahan penyakit karantina maka tidak ada kegiatan ataupun program bantuan sosial

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja bantuan sosial	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.00,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut

:Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai Di Brankas	-	
Uang Di Rekening Bendahara		
Jumlah	-	

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp. 0,00,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang

tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas bendahara tahun 2024 Rp.0,00 dikarenakan semua penerimaan Negara langsung masuk ke kas Negara dengan menggunakan system MPN-G2 dan tidak menerima uang cash untuk pembayaran jasa karantina ikan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp.0,00

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00. dan Rp.00.

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada Tahun 2024 terdapat piutang bukan pajak dikarenakan belum disetornya ke kas negara potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2024, dan penyetoran melalui pemotongan spm pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2024. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut;

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
	NIHIL		
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar

TPA

Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1			
2			
3	NIHIL		
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA
2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.127.935.093
,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.127.935.093 dan Rp.31.304.683,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai

berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	17,039,777	36,486,728
Barang untuk Pemeliharaan	856,300	4,636,950
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	7,180,064
Bahan baku	325,388,077	16,394,970
Jumlah	343,284,154	64,698,712

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp.0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1			
2			
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.5.693.266.000

,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.5,693,266,000 dan Rp.5.693.266.000,-. Ada kenaikan nilai tanah pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5,693,266,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	5,693,266,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

1	1,480	Jl. Kenangan No.26 Maguwoharjo Depok Sleman	5,693,266,000
Jumlah			5,693,266,000

Total aset tanah Stasiun KIPM Yogyakarta 1.480 m².

*Peralatan dan
Mesin*

Rp.4.317.287.095

,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.4.317.287.095 dan Rp.6.459.325.022,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Aset Perolehan per 31 Desember 2024	4,317,287,095
Mutasi tambah:	
Hibah Barang	0
Penyitaan barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo Aset per 31 Desember 2023	4,317,287,095
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4,317,287,095

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- ❖ Lemari Besi
- ❖ Kursi Besi
- ❖ Tempat Tidur kayu
- ❖ Printer

*Gedung dan
Bangunan
Rp.2.624.428.000
,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 2.624.428.000,- dan Rp.2.624.428.000,- Mengalami penyusutan reguler semester I Tahun 2021 dan penyesuaian nilai hasil inventaris asset dari KPKNL Kementerian Keuangan transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	
Mutasi tambah:	
Pengembangan gedung laboratorium	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Tidak ada transaksi penambahan Gedung dan Bangunan di kantor Stasiun KIPM Yogyakarta.

*Jaringan
Rp.9.980.000,-*

C.17 Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.980.000, dan Rp.9.980.000,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	9,980,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	9,980,000
Nilai Buku per 31 Desember 2024	9,980,000

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada aset jalan, irigasi dan jaringan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.00*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. dan Rp.49.467.000,00. Aset tetap tersebut berupa monografi, map, maket gedung Stasiun KIPM Yogyakarta.

Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Mutasi tambah:	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang

Rp.0 merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

Rp.(4.547.976.526),-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing RP. (4.547.976.526) dan Rp. (6.236.160.802) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2024

1	Tanah	5,693,266,000	0	5,693,266,000
2	Peralatan dan Mesin	6,415,313,522	4,971,470,926	1,443,842,596
3	Gedung dan Bangunan	2,624,428,000	280,582,836	2,343,845,164
4	Jaringan	9,980,000	9,319,864	13,173,136
5	Aset Tetap Lainnya	49,467,000	968,000	49,467,000
Akumulasi Penyusutan		14,792,454,522	5,262,341,626	10,105,729,465

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

Uraian	Nilai Perolehan
NIHIL	NIHIL
Jumlah	

Aset Lain-Lain
Rp.00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.00,- dan Rp. 968.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Tetap yang tidak digunakan dijelaskan sebagai berikut:

- PH Meter (Alat Ukur Universal)
- Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengantur

Temperatur

- Mesin Ketik Manual
- Papan Visual /Papan Nama
- White Board
- Mesin absensi
- Numerator
- Perforator Besar
- Meja kerja Kayu
- Partisi
- Nakas
- Jam Elektronik
- Kipas angin
- Kompor gas
- Kitchen Set
- Sound System
- Stabilisator
- Aquarium
- Dispenser
- Handy Cam
- Vertikal Blind
- Pesawat Telephone
- Telephone Mobile
- Facsimile
- Auto clave(Alat Laboratorium Umum)
- Rod Blower
- P.C Unit
- Laptop
- Tablet PC
- Printer
- Scanner

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp*

(6.051.754.509)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.(6.051.754.509),- dan Rp.(5.849.119.812),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tetap yang tidak digunakan	(6,051,754,509)	968,000	(6,052,722,509)
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	968,000	968,000	0
Jumlah	968,000	968,000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.00,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.00,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan

Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp.46.404.925,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.22.181.360,- dan Rp.21.147.149,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik	15,166,810	untuk Bulan Desember
Belanja Langganan Internet	1,095,850	untuk Bulan Desember
Belanja Langganan TLP	1,187,715	untuk Bulan Desember
Pembayaran tukin susulan	5,979,200	untuk Bulan Desember
Pembayaran uang makan susulan Rizka	350,000	untuk Bulan Desember
Pembayaran uang makan susulan ishaak	316,350	untuk Bulan Desember
Dana Tampung	22309000	untuk Bulan Desember
Total	46,404,925	

Pendapatan

Diterima di

Muka

Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai

berikut:

Rincian Pendapatan Diterima dimuka

Uraian	Jumlah
NIHIL	NIHIL
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2024 dan TA 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp.
8.200.823.737*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.200.823.737,- dan Rp. 8.609.428.543,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL**

Rp.74.015.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.74.015.000,- dan Rp. 99.720.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	74,015,000	99,720,000	(26)
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	74,015,000	99,720,000	(26)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan sensor karantina ikan mengalami kenaikan di karenakan jumlah pengujian sampel laboratorium baik lalu lintas maupun non lalulintas.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp.2.737.282.121,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp **2.737.282.121** dan Rp.5.151.155.031,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2,641,548,214	2,377,086,346	11
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2,315,427,817	2,024,481,083	14
Beban Lembur	194,179,000	157,095,000	0
Jumlah	5,151,155,031	4,558,662,429	13

*Beban
Persediaan
Rp.61.193.053,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.61.193.053 dan Rp.522.530.790,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	96,732,846	95,819,071	
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-		
Bahan Persediaan bahan baku	129,993,975	365,396,325	
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan		0	
Beban Persediaan Lainnya	-		0
Jumlah	226,726,821	461,215,396	(51)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.1.197.201.133,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.197.201.133 dan Rp.2.008.827.486,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta

beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	690,184,036	469,199,350	47.10
Beban penambah daya tahan tubuh	27,968,000	83,497,000	(66.50)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	8,710,180	12,027,800	(27.58)
Beban honor operasional satuan kerja	56,256,000	116,520,000	(51.72)
Beban barang operasional lainnya	50,977,013	52,203,600	(2.35)
Beban bahan	42,194,628	32,227,528	30.93
Beban honor output kegiatan	15,130,000	5,500,000	175.09
Belanja barang non operasional lainnya	35,487,000	25,500,000	39.16
Beban langganan listrik	201,510,956	204,468,310	(1.45)
Beban langganan telepon	11,410,639	11,177,191	2.09
Beban Langganan Daya & jasa lainnya	82,679,589	91,949,100	(10.08)
Beban sewa	117,236,667	132,416,667	(11.46)
Beban jasa profesi	2,000,000	50,150,000	(96.01)
Beban jasa lainnya	105,850,000	555,971,007	(80.96)
Beban aset Ekstrakontabel peralatan & Mesun	220,510,100	6,157,000	3481.45
Jumlah	1,197,201,133	2,008,827,486	(40.40)

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp.401.747.943,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.967.103.406,- dan Rp. 486.997.3812,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang menurun . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	197,930,186	288,357,975	-31.36
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,410,000	53,550,000	-65.62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,616,523	14,965,600	-69.15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	180,791,234	130,123,806	38.94
Jumlah	401,747,943	486,997,381	-17.51

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta tidak mempunyai anggaran untuk diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.299.524.268*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.202.634.697,- dan Rp.387.040.990,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban penyusutan amortisasi	202,634,697	453,411,810	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.(00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00, dan Rp.00,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp.49.467.000,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan Peralatan Dan Mesin	94,107,666		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	94,107,666	0	

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika*

penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out

Pos Luar Biasa

Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.8.609.428.543

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.8.609.428.543,- dan Rp. 9.654.124.066,-

Surplus /Defisit

LO

Rp.(9.019.903.696)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(4.947.540.405) dan Rp.(9.204.309.989,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit

kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

Selisih Revaluasi

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00,- dan Rp.0,00.

Koreksi Aset Tetap

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.00,- dan Rp.0,00,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rp.0,-

Koreksi Lain-Lain **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Rp.0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri :

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp.8.548.166.817,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.548.166.817,- dan Rp. 7.193.271.883,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas Lain	4,765,144,207
Diterima ke Entitas Lain	74,015,000
Transfer Masuk	183,288,020
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5,022,447,227

*Diterima dari
Entitas Lain*

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*Transfer masuk /
Transfer keluar Rp.
183.288.020,-*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DDEL sebesar Rp.4.765.144.207,- sedangkan DKEL sebesar Rp.74.015.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.16.113.130,-

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		
	Jumlah		-

*Pengesahan Hibah
Langsung dan
Pengembalian Rp.*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

0 pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL		Rp -
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.8.200.823.737,-

,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing Rp.8.200.823.737,- dan Rp.9.265.571.715,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

NIHIL.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada Tahun Anggaran 2024 Periode Tahunan terdapat

Transaksi Transfer masuk yang berasal dari Sekretariat BKIPMKHP, BKIPM Semarang, BKIPM Denpasar dengan uraian sebagai berikut :

- a. 68/BPPMHKP-1/PL.520/I/2024, 30 Januari 2024 Sekretariat BKIPMKHP Kode B
- b. 388 /BPPMHKP.I/PL.520/VII/2024, 24 Juli 2024 Sekretariat BKIPMKHP Kode B
- c. 613/BPPMHKP.I/PL .520/XI/2024, 20 November 2024 Sekretariat BKIPMKHP Kode B
- d. 689/BPPMHKP -1/PL520/XII/2024, 30 Desember 2024 kode B,D,E,H Sekretariat BKIPMHKP

Transfer Keluar ;

- a. 132/SKIPM .JOG/PL.520/II/2024 16 Februari 2024 BKIPM Semarang kode E Rp, 332.750
 - b. 321/SKIPM JOG/PL.520/IV/2024 04 April 2024 BKIPM Semarang Rp. 259.750 HC, K1-D1
 - c. 1314/BPPMHKP -1 /PL 520/XII/2024 31 Desember 2024 Denpasar Rp. 159.600 & Rp. 172.900
 - d. 1431 /BPPMHKP.I/PL.520/XII/2024 31 Desember 2024 Makasar RP. 505.400, Rp. 159.600,-
 - e. B.677/BKIPM.SMG/PL.520/XII/2024 30 Desember Kode D BKIPM Semarang
 - f. 03/HC/II2/2024 Kode B Denpasar Bali
2. Akun 425332 yang seharusnya BKI akan tetapi masih tercatat di KKP karna merupakan Volatil Badan Mutu
 3. Adanya utang Pihak Ke Tiga senilai Rp. 46.404.925 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Akrua Pembayaran Listrik per 31 Desember 2024 senilai :

Rp. 155.166.810,-

- b. Akrual Pembayaran Telepon per 31 Desember 2024 senilai Rp. 1187.715,-
 - c. Akrual Pembayaran Internet per 31 Desember 2024 Senilai Rp 1.095.850
 - d. Akrual Pembayaran Tukin Susulan an Izhaak senilai Rp. 5.979.200,-
 - e. Akrual susulan uang makan an Izhak Rp. 316.350,-
 - f. Akrual Pembayaran susulan uang makan an Rizka Rp. 350.000,-
 - g. Akrual RPATA outsouching yang SP2Dnya terbit dibulan Januari 2025.
4. Adanya Koreksi Aset Reval Koreksi disebabkan terdapat kesalahan input kode barang kedalam Aplikasi oleh operator satker ,sehingga dilakukan penginputan saldo Awal atas kode barang sesuai dengan Jumlah dan Nilainya